

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)

Dwi Karno

dwikcasual@yahoo.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of Participatory Budgeting and Performance-Based Budget Implementation to the Government Agencies Performance with case studies at the Regional Government Organization (OPD) of the Surabaya City Government. This research is a quantitative research. The data collection method has been conducted by using survey method. The data is the primary data through the issuance of questionnaires to the respondents. The sample collection method has been done by using purposive sampling method. The numbers of samples are 56 respondents. Meanwhile, the analysis technique used in this research used multiple linear regression analysis with SPSS application tools (Statistical Product and Services Solutions) version 20.0. The results of this study indicate that Participatory Budgeting has a positive effect on the performance of government agencies with test results having a significance value of $0,000 < 0,05$, and Performance Based Budget Implementation has a positive effect on the performance of Government Institutions with test results having a significance value of $0,000 < 0,05$. The results of this study have supported all the hypotheses that have been formulated in this study.

Keywords: Participatory Budgeting, Performance-Based Budget Implementation, Government Agencies Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penganggaran Partisipatif dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 56 responden. Sedangkan, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penganggaran Partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Instansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik, kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah tanggap terhadap lingkungan. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sumber kebocoran dana dan intitusi yang selalu merugi. permasalahan ini terdapat pada kinerja instansi pemerintah dalam menyusun anggaran (penganggaran partisipatif) dan metode yang digunakan dalam menyusun anggaran (penerapan anggaran berbasis kinerja) sudah benar atau tidak.

Anggaran merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan dokumen yang sangat

dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan dokumen yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sejak pelaksanaan otonomi daerah diawali berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diubah dengan UU 32 tahun 2004 dan terakhir berdasarkan 23 Tahun 2014 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggung jawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggung jawaban dari pertanggung jawaban vertikal ke pertanggung jawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan mengindikasikan adanya kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran anggota organisasi dalam tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menyimpang dari tujuan dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Penganggaran partisipatif adalah proses yang menggambarkan individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nordriawan *et al*, 2007). Penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Milani, 1975).

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan.

Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian

tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*. Atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem anggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2003 dan sebelumnya penyusunan APBD Kota Surabaya menggunakan sistem Manual Adminitrasi Keungan Daerah (MAKUDA) (*line item dan incremental*) yang disusun secara lebih sederhana. Tahun 2005 penyusunan APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Teori keagenan sudah mulai berkembang berawal dari adanya penelitian oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut *principal*. Maksimalisasi kekayaan *principal* akan diserahkan kepada pihak-pihak yang dianggap profesional untuk mengelola perusahaan. Pihak profesional tersebut dalam perusahaan disebut sebagai manajemen, yang dalam teori keagenan disebut sebagai *agent*.

Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut *principal* menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai *agent*, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut (Brigham dan Houston, 2006:26). Teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan sosiologi, dan teori organisasi. Teori *principal-agent* menganalisis susunan diantara dua atau lebih

individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik eksplisit maupun implisit dengan pihak lain yaitu agent dengan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*. Pola hubungan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) adalah kemitraan dan bersifat sejajar (Bastian, 2006:346).

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Teori Partisipasi

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan seluruh pegawai dalam proses perencanaan dan pembangunan pemerintah. Menurut Sundariningrum (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (1) Partisipasi Langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. (2) Partisipasi tidak langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipatifnya. Cohen dan Uphoff (2011: 61-63) membedakan partisipatif menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Penganggaran Partisipatif

Partisipatif dalam proses penyusunan anggaran dianggap sebagian orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi dari para anggota organisasi. Partisipatif adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Partisipatif secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi merupakan inti dari proses demokratis dan oleh karena itu tidaklah alamiah jika diterapkan dalam struktur organisasi yang otoriter.

Dalam konteks yang lebih spesifik, partisipatif dalam penyusunan anggaran merupakan proses di mana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran. Hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen menyimpulkan bahwa partisipatif menguntungkan organisasi. bahwa ketika hal tersebut diterapkan dalam situasi yang salah, partisipasi dapat menurunkan motivasi dan usaha karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara garis besar, penyusunan anggaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) *Top down approach* (bersifat dari atas-ke-bawah) Dalam penyusunan anggaran ini, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa saja yang telah disusun. Tapi pendekatan ini jarang berhasil karena mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana anggaran. (2) *Bottom up approach* (bersifat dari bawah-ke-atas) Pada *bottom up approach*, anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan atasan untuk mendapatkan pengesahan. Dalam pendekatan ini, manajer tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Pendekatan dari bawah ke atas dapat menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran, tetapi apabila tidak dikendalikan denganhati-hati dapat menghasilkan jumlah yang sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan perusahaan. (3) Kombinasi *top down* dan *bottom up* Kombinasi antara kedua pendekatan inilah yang paling efektif. Pendekatan ini menekankan perlunya interaksi antara atasan dan bawahan secara bersama sama menetapkan anggaran yang terbaik bagi perusahaan.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari rencana strategis dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja (Koswara, 2008). Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya adalah: (1) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi kinerja instansi dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. (2) Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja (Mahmudi, 2007): (1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. (2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. (3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang). (4) Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas. (5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan antara lain prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan peranan legislatif.

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan suatu urutan kegiatan yang terencana.

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik.

Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Penganggaran partisipatif adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan kata lain dalam penyusunan anggaran para manajer tidak hanya melaksanakan anggaran yang telah ditentukan atasan, namun juga perlu berperan aktif dalam penyusunannya. Seperti dikemukakan oleh Milani (1975), bahwa tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan terhadap dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara penganggaran partisipatif dengan anggaran non partisipatif.

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2011) yang menunjuka bahwa Partisipatif penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Demak, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka semakin kuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Demak, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka semakin kuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Demak. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

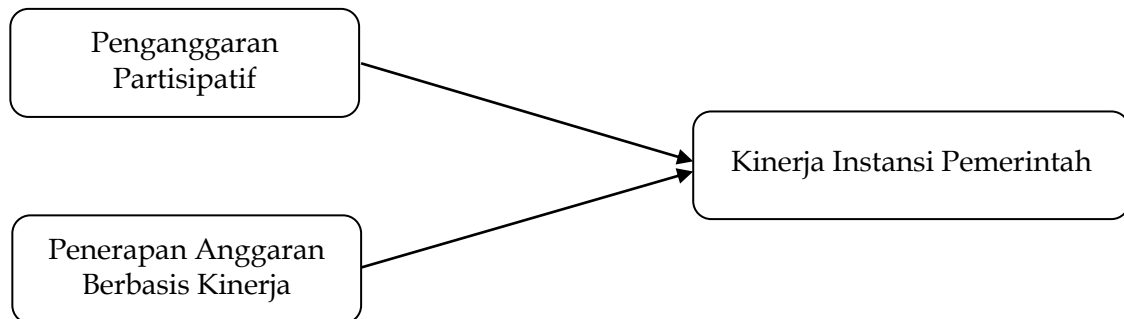
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim (2007: 177) menjelaskan bahwam elemen-elemen yang penting harus ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran berbasis kinerja adalah: (1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya. (2) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi. (3) Kinerja instansi dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dan prestasinya. (4) Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemograman, penganggaran dan evaluasi

Menurut Muthaher (2007) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

H₂: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rancangan penelitian yang akan menjelaskan secara logis mengenai hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan mengetahui bagaimana pengaruh hubungan antara penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah kota. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di lingkungan Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 72 OPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya, jumlah OPD Kota Surabaya adalah 72 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 18 Dinas, 18 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, Inspektorat, RSUD Dr. Mohammad Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, Satuan Polisi Pamong Praja dan 31 Kecamatan. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti adalah satu sampai dua level manajemen dibawah kepala OPD (Dinas/Badan) dilingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri serta menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja instansi pemerintah. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran partisipatif merupakan keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan sumber daya pada aktivitas suatu organisasi. Indikator pengukuran penganggaran partisipatif: (1) Pengaruh yang besar dalam partisipasi penyusunan anggaran. (2) Pengaruh dalam penyusunan revisi anggaran. (3) Pengaruh mengenai pendapat/saran/usulan dalam penetapan anggaran. (4) Keyakinan dalam memutuskan suatu anggaran. (5) Pentingnya kontribusi usulan atau pemikiran dalam penyusunan anggaran. (6) Keikutsertaan dalam kegiatan penyusunan anggaran.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan output atau hasil apa yang ingin dicapai, mengidentifikasi input, output dan outcome yang dihasilkan dengan dilaksanakannya suatu aktivitas atau kegiatan. Indikator pengukuran penganggaran berbasis kinerja: (1) Menghubungkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Renja-OPD. (2) Menghubungkan antara Renja SPD dengan RKAOPD. (3) Mengidentifikasi input dari kegiatan. (4) Mengidentifikasi output dari kegiatan. (5) Mengidentifikasi outcome dari kegiatan.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang dikembangkan Wulandari, (2011). Indikator Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah: (1) Kinerja instansi. (2) Kejelasan sasaran Visi dan misi program. (3) Evaluasi Analisis keuangan. (4) Pembuatan laporan Investigasi Pengawasan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan analisis terhadap data, yang bertujuan mengolah sebuah data mentah menjadi sebuah informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model regresi linier berganda untuk keabsahan hasil analisis maka terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen penelitian, dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS 20. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependenyang diteliti.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari Pernyataan. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas menurut Ghozali (2011:53) adalah: (1) Jika $r_{hitung} > r$

tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. (2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja) pada variabel dependen (kinerja instansi pemerintah). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$KP = a + \beta_1 PP + \beta_2 AK + e$$

Keterangan:

KP = kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

PP = Penganggaran Partisipatif

AK = Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

e = Error

Setelah diketahui persamaan regresi maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ditafsirkan berdasarkan atas nilai koefisien dari variabel bebas. Untuk mempermudah perhitungan regresi linier berganda di atas dihitung dengan menggunakan program SPSS 20.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak, dan pengujian ini dilakukan untuk memperoleh persamaan yang baik dan mampu memberikan estimasi yang handal. Pengujian ini dilakukan untuk pengujian terhadap tiga asumsi klasik, yaitu: normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS 20.

Uji Normalitas menurut Ghazali (2011) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dan residualnya. Dasar pengambilan keputusan: (1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka menunjukkan pola distribusi normal dan dikatakan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal dan dikatakan regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghazali (2005:105) bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisis: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. (3) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebart di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinietitas adalah dengan melihat tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10. Multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen. Apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,09), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model atau *F test* (Uji F) yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Of fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak.

R^2 atau adjusted R^2 atau koefisien determinasi merupakan kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila mampu mempresentasikan atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika r hitung $> r$ tabel, maka pertanyaan kuesioner dinyatakan

valid ($\alpha=5\%$). Berdasarkan pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Penerapan anggaran berbasis kinerja	AK1	0,838	0,263	Valid
	AK2	0,871	0,263	Valid
	AK3	0,904	0,263	Valid
	AK4	0,687	0,263	Valid
	AK5	0,878	0,263	Valid
Penganggaran partisipatif	PP1	0,487	0,263	Valid
	PP2	0,685	0,263	Valid
	PP3	0,574	0,263	Valid
	PP4	0,849	0,263	Valid
	PP5	0,776	0,263	Valid
	PP6	0,771	0,263	Valid
Kinerja instansi pemerintah	KP1	0,676	0,263	Valid
	KP2	0,754	0,263	Valid
	KP3	0,749	0,263	Valid
	KP4	0,789	0,263	Valid
	KP5	0,538	0,263	Valid
	KP6	0,865	0,263	Valid
	KP7	0,635	0,263	Valid
	KP8	0,877	0,263	Valid
	KP9	0,719	0,263	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel independen yaitu penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja serta variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai r hitung > r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penganggaran Partisipatif	0,883	Reliabel
Penerapan anggaran berbasis kinerja	0,768	Reliabel
Kinerja instansi pemerintah	0,889	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang

berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda antara penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah dengan dibantu program SPSS 20 dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	T	Sig
Konstanta	0,413	-	-
PP	0,362	3,960	0,000
AK	0,531	4,420	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

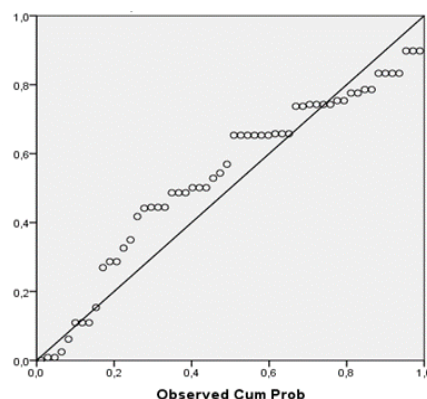
$$KP = 0,413 + 0,362PP + 0,531AK + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa: (1) β_1 (nilai koefisien regresi penganggaran partisipatif) bernilai positif, mempunyai arti apabila penganggaran partisipatif semakin meningkat, maka kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan semakin meningkat. (2) β_2 (nilai koefisien regresi penerapan anggaran berbasis kinerja) bernilai positif, mempunyai arti apabila penerapan anggaran berbasis kinerja semakin meningkat, maka kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan semakin meningkat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Data berdistribusi normal, jika penyebaran plot berada disepanjang garis 45°. Hasil normalitas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Tabel 4
 Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	1,293	
Asymp. Signifikansi	0,071	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45°, sedangkan berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,071 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 5:

Tabel 5
 Hasil Uji Multikolinieritas

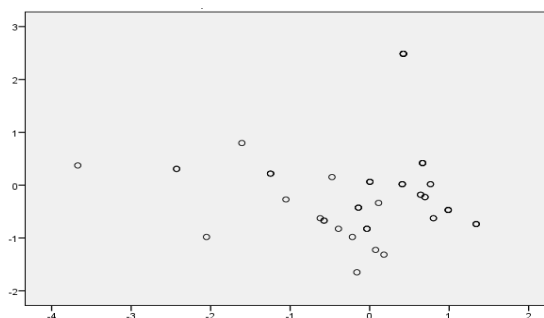
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PP	0,737	1,357	Non Multikolinearitas
AK	0,737	1,357	Non Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar 3
 Gambar Scatterplot

Berdasarkan Gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kinerja instansi pemerintah berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

Uji Kelayakan Model

Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.199	2	3.599	36.072	.000 ^a
Residual	5.288	53	.100		
Total	12.487	55			

a. Predictors: (Constant), PP, AK

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 36,072. Berdasarkan tingkat signifikansinya, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kinerja instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.759 ^a	.576	.561	.31588	1.711

a. Predictors: (Constant), PP, AK

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,759. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah kuat karena $> 0,50$. Nilai *R Square* sebesar 0,576 atau 57,6%, ini menunjukkan bahwa variabel kinerja instansi pemerintah yang dapat dijelaskan variabel penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 57,6%, sedangkan sisanya 42,4% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis
Uji Statistik t

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.413	.433		.953	.345
PP	.362	.091	.412	3.960	.000
AK	.531	.120	.460	4.420	.000

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel 8 maka hasilnya memberikan pengertian bahwa: (1) Pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk partisipasi penyusunan anggaran adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa partisipatif penyusunan anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh partisipatif penyusunan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah diterima. (2) Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk anggaran berbasis kinerja adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Penganggaran Partisipatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel penganggaran partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penganggaran partisipatif adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan kata lain dalam penyusunan anggaran para manajer tidak hanya melaksanakan anggaran yang telah ditentukan atasan, namun juga perlu berperan aktif dalam penyusunannya. Seperti dikemukakan oleh Milani (1975), bahwa tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan terhadap dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara penganggaran partisipatif dengan anggaran non partisipatif. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2011) yang menunjuka bahwa Partisipatif penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Demak, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka semakin kuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten

Demak, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka semakin kuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai tingkat signifikansi terhadap kinerja instansi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Menurut Muthaher (2007) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji penganggaran partisipatif dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Variabel penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. (2) Variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah adalah: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor kepuasan kerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, mengingat terdapat pengaruh sebesar 42,4% dari variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. (2) Diharapkan pegawai dapat berperan serta dalam penyusunan anggaran, sehingga pegawai lebih mengetahui seluk beluk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Brigham, E. F. dan J. F. Houston. 2006. *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Edisi kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Cohen dan Uphoff. 2011. Klasifikasi Partisipasi. <http://id.Shovoong.com>. diakses 12 Juli 2017 (19.27).
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jensen, M. and Meckeling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*. 3(305).
- Koswara, S. 2008. Teknologi Enkapsulasi Flavor Rempah-Rempah. <http://www.ebookpangan.com>. diakses 20 Mei 2017 (08.10).
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Andi. Yogyakarta.
- Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitude: A Field Study, *The Accounting Review*. 2(1):274-284.
- Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1):37-49.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Nuryaman. dan C. Veronica. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 58 Tahun 2005 *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Safitri, R. A. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sundariningrum. 2001. *Klasifikasi Partisipasi*. Grasindo. Jakarta.
- Tilaar, H. A. R. 2009. Pengertian Partisipasi. <http://www.bebasbanjir2025.wordpress.com>. *Konsep-konsep/partisipasi*. Diakses 5 Juli 2017 (08.30).
- Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wulandari, E. N. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*. 2(1).